

TESIS

**PENGAMBILAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**



MUHAMMAD ERFAN FERNANDA

NIM. 2420215310114

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN , 2026

**PENGAMBILAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

TESIS

Untuk memperoleh gelar Magister
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan oleh

MUHAMMAD ERFAN FERNANDA

NIM. 2420215310114

PROGRAM MAGISTER

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN , 202

Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 2 Juli 2026

Pembimbing,



Dr. H. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003

Disahkan Oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H., M.H.
NIP. 197202081999031004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. ACHMAD FAISAL, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

**Judul Tesis : PENGAMBILAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019**

Nama : Muhammad Erfan Fernanda

NIM : 2420215310114

**Disetujui
Pembimbing**



**Dr. H. RACHMADI USMAN, S.H., M.H.
NIP. 196709141993031003**

Diketahui,

**Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**



Dr. H. AHMAD SYAUFU, S.H, M.H

NIP. 197202081999031004

Tanggal Lulus :

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Lambung Mangkurat



Dr. ACHMAD FAISAL, S.H, M.H.

NIP.197506152003121001

Tanggal Wisuda :

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Erfan Fernanda

Nomor Induk Mahasiswa : 2420215310114

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Ekonomi

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiarisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas , maka bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Banjarmasin, ~~Selam~~ 2 Juni 2026
Yang membuat pernyataan,



MUHAMMAD ERFAN FERNANDA

NIM. 2420211510114

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Tesis ini telah pertahankan
Di depan sidang panitia penguji
Pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/ Anggota : Dr. H. Saprudin, S.H.,LL.M.

Sekretaris/Anggota : Dr. Hj. Syahrída, S.H.,M.H,

Anggota : Dr. H. Rachmadi Usman, S.H.,M.H.

MOTO

Berusahalah untuk tidak menjadi manusia yang berhasil tapi berusahalah menjadi manusia yang berguna (**Kata bijak Albert Einstein**)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan Penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridho-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan, diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan Ibunda terkasih

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang saleh dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudah-mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridho ayah bunda amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahanda dilapangkan kuburnya dan ibunda selalu mendapatkan lindungan-Nya. Dihaturkan sembah sujud buat ayah dan ibu berdua.....

Dosen Pembimbing Tesis

Terima kasih kepada **Dr. H. Rachmadi Usman, S.H, M.H.** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka. Engkau merupakan panutan kami semua ...

MUHAMMAD ERFAN FERNANDA. 2026 HAK PENGAMBILAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 . Program Magister Ilmu Hukum Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 111 Halaman. Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman , S.H.,M.H

RINGKASAN

Tesis ini berjudul “Pengambilan Benda Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”. Tesis ini membahas mengenai perubahan mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan penafsiran terhadap ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan muncul karena adanya perbedaan pengaturan antara Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang berdampak terhadap pelaksanaan pengambilan objek jaminan fidusia.

Tesis ini menguraikan bahwa jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum kepada penerima fidusia dalam hubungan pembiayaan. Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi, penerima fidusia dapat melaksanakan eksekusi berdasarkan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia. Namun setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi dan pemberi fidusia tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela.

Pembahasan dalam tesis ini menganalisis keberlakuan dan kekuatan mengikat Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia setelah Putusan Mahkamah Konstitusi. Pasal 30 tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat karena tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun penerapannya tidak lagi dapat dijadikan dasar untuk melakukan pengambilan objek jaminan secara langsung tanpa memperhatikan prosedur hukum yang berlaku. Pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui kesepakatan para pihak atau mekanisme pengadilan apabila terjadi penolakan dari pemberi fidusia.

Tesis ini juga membahas adanya ketidaksinkronan antara Pasal 15 dan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Pasal 15 memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia, sedangkan Putusan Mahkamah Konstitusi memberikan batasan dalam pelaksanaannya dengan

mengutamakan prinsip kepastian hukum dan due process of law. Ketidaksinkronan tersebut menyebabkan adanya ketidakpastian hukum dalam praktik pengambilan objek jaminan fidusia. Berdasarkan hasil pembahasan, tesis ini menyimpulkan bahwa diperlukan konstruksi hukum yang mampu menyeimbangkan kepentingan penerima fidusia dan pemberi fidusia. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus tetap memberikan perlindungan terhadap hak penerima fidusia, namun dilakukan melalui prosedur hukum yang jelas agar tidak menimbulkan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.

MUHAMMAD ERFAN FERNANDA. 2026 HAK PENGAMBILAN BENDA OBJEK JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 . Program Magister Ilmu Hukum Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. 111 Halaman. Pembimbing : Dr. H. Rachmadi Usman , S.H.,M.H

ABSTRAK

Kata Kunci : Jaminan Fidusia, Eksekusi, Putusan Mahkamah Konstitusi.

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam kegiatan pembiayaan. Namun, pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia mengalami perubahan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang memberikan penafsiran terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permasalahan dalam tesis ini adalah mengenai keberlakuan dan kekuatan mengikat Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia serta ketidaksinkronan antara Pasal 15 dan Pasal 30 setelah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap berlaku dan memiliki kekuatan mengikat karena tidak dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, pelaksanaannya tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan mutlak bagi penerima fidusia untuk mengambil objek jaminan secara sepihak. Eksekusi harus dilakukan berdasarkan kesepakatan mengenai wanprestasi dan penyerahan objek jaminan secara sukarela, atau melalui mekanisme pengadilan apabila terjadi penolakan. Ketidaksinkronan antara Pasal 15 dan Pasal 30 menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga diperlukan harmonisasi norma agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tetap memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi para pihak.

MUHAMMAD ERFAN FERNANDA. 2026. THE RIGHT TO TAKE FIDUCIARY GUARANTEE OBJECTS AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION NUMBER 18/PUU-XVII/2019. Master of Law Study Program, Legal Studies, Faculty of Law, Lambung Mangkurat University. 111 Pages. Supervisor: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

ABSTRACT

Keywords : *Fiduciary Guarantee, Execution, Constitutional Court Decision.*

Fiduciary guarantee is a security institution that provides legal protection for fiduciary recipients in financing activities. However, the execution of fiduciary guarantee objects has changed after the issuance of Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, which interpreted Article 15 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. This thesis examines the validity and binding force of Article 30 of the Fiduciary Guarantee Law and the disharmony between Article 15 and Article 30 after the Constitutional Court Decision. This research uses normative legal research with statutory and conceptual approaches.

The results show that Article 30 of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee remains valid and legally binding because it was not annulled by the Constitutional Court. However, its implementation cannot be interpreted as an absolute authority for fiduciary recipients to take the guaranteed object unilaterally. Execution must be carried out based on an agreement regarding default and voluntary surrender of the object, or through court procedures if there is a refusal. The disharmony between Article 15 and Article 30 creates legal uncertainty; therefore, harmonization of norms is required to ensure legal certainty and balanced legal protection for the parties.

UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrahmanirrahim,

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan *shalawat* dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para *tabi'in* dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan, dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Tesis ini. Atas budi baiknya, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.

Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu per satu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang disebutkan, di antaranya yaitu:

1. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Achmad Faisal, S.H.,M.H .selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Magister Hukum sekaligus selaku Dosen Pembimbing Akademik;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Ahmad Saufi, S.H, M.H. , selaku Ketua Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar Bapak Dr. H. Rachmadi Usman S.H.,M.H selaku Pembimbing dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan Tesis ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan Tesis ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Saprudin, S.H.,LL.M. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Tesis dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. Hj. Syahrída, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penguji Ujian Tesis dan yang terhormat lagi amat terpelajar Dr. H. Rachmadi Usman S.H.,M.H selaku Anggota Panitia Penguji Ujian Tesis, yang juga peranannya tidak kalah penting telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian Tesis ini;
5. Yang terhormat lagi amat terpelajar semua Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang didapat dari mereka, yang ke semuanya itu memberikan inspirasi agar menjadi orang lebih bermanfaat bagi orang lain;
6. Kepada semua pihak yang tidak mungkin lagi disebutkan satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah membantu peneliti baik langsung maupun tidak langsung, memberikan dorongan, sehingga penyusunan Tesis ini selesai tepat waktu.

Peneliti menyadari, bahwa Tesis ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh suka cita dan tangan terbuka akan menerima saran dan

masukannya yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri pendidikan akademik Program Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin,,.....

MUHAMMD ERFAN FRNANDA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL DEPAN	I
HALAMAN JUDUL DALAM	II
LEMBAR PENGESAHAN.....	III
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	VI
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN TESIS.....	VII
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	VIII
RINGKASAN	IX
ABSTRAK	XI
UCAPAN TERIMA KASIH.....	XIII
DAFTAR ISI	XVI
DAFTAR TABEL	XVIII
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Keaslian Penelitian.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Metode Penelitian.....	45
G. Sistematika Penulisan.....	47
 BAB II KEBERLAKUAN DAN KEKUATAN MENGIKAT PASAL 30	
UNDANG-UNDANG JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN	
MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/201	50
A. Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999	50
B. Kedudukan dan Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 terhadap Eksekusi Fidusia.....	56
C. Keberlakuan Pasal 30 Undang-Undang Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.....	60
D. Pelaksanaan Pengambilan Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan	

Mahkamah Konstitusi.....	65
E. Kekuatan Mengikat Pasal 30 dalam Pelaksanaan Eksekusi Fidusia	69
BAB III KETIDAKSINKRONAN PASAL 15 DAN PASAL 30 UNDANG-UNDANG	
JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 DAN KONSTRUKSI HUKUM	
PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA	75
A. Ketidaksinkronan Pengaturan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan	
Mahkamah Konstitusi	75
B. Ketidakpastian Hukum dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia	80
C. Disharmoni Norma dalam Pelaksanaan Eksekusi Fidusia	86
D. Konstruksi Hukum Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan	
Mahkamah Konstitusi	92
E. Konsep Ideal Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia.....	101
BAB IV PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran	111
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1.1 : Ketidaksinkronan Norma Eksekusi Fidusia	4
---	---